



Perempuan Harus Aktif Dalam Musrenbang

UMBULHARJO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan kegiatan musyawarah tahunan yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah menetapkan program substansial yang akan dilaksanakan pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta Lucy Irawati, dalam acara pelatihan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bagi perempuan di Kota Yogyakarta di Gedung PKK Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/11), menjelaskan, dalam Musrenbang yang dihadiri Kader PKK se-Kota Yogyakarta ini, masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk menganalisa keadaan mereka dan membuat usulan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran partisipatif mengupayakan usulan masyarakat tidak hanya formalitas belaka dalam musrenbang, tetapi memberikan kepastian bahwa program yang diusulkan dapat terakomodasi. Lucy menambahkan, berdasarkan musrenbang tahun kemarin, sudah ditetapkan bahwa Tingkat kehadiran perempuan

minimal 25 persen, dan itu sudah bisa dilakukan. Namun yang masih menjadi pertanyaan, dari 25 persen perempuan yang hadir apakah sekedar hadir untuk memenuhi kuota, atau turut aktif berpartisipasi mengajukan usulan dan kritik berdasar data dan fakta yang terjadi dilapangan.

“Ke depan, untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2017-2021 yang diperhatikan bukan sekedar kehadiran, tetapi berapa persen program yang dirancang memperhatikan afirmasi gender perempuan dan anak. Namun usulan program ini bukan hanya berdasar keinginan, namun apa yang dibutuhkan, berdasarkan analisa situasi dan kondisi,” katanya.

Menurutnya, aspek gender kini sudah menjadi hal yang prioritas selain aspek perlindungan anak dan difabel di Kota Yogya. Dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian, terbukti dengan adanya semakin banyak kegiatan.

“Namun tetap dibutuhkan pemahaman perempuan, dalam merancang, membuat anggaran, melaksanakan, hingga mengevaluasinya. Perempuan harus terus meningkatkan SDM untuk dapat lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan. (*/fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005